

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Syaukani (2006) dalam Novan Mamoto (2018), mengatakan bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak sesuai yang direncanakan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pertama, penyusunan peraturan turunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, penyediaan berbagai sumber daya untuk mendukung pelaksanaan implementasi, mencakup fasilitas, dana, serta penunjukan pihak yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut. Ketiga, pelaksanaan kebijakan secara nyata dan langsung kepada masyarakat.

Pada era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan transformasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pada bidang administrasi kependudukan. Salah satu bentuk inovasi yang tengah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan representasi digital dari data kependudukan yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fisik melalui Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Perbedaan utama antara IKD dan KTP terletak pada media penyimpanan serta cara mengakses informasi identitas kependudukan.

KTP merupakan dokumen resmi berbentuk kartu fisik yang memuat data pribadi seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan foto, serta selama ini digunakan sebagai alat identifikasi utama dalam berbagai keperluan administratif, baik pada sektor pemerintahan maupun swasta. Meskipun masih efektif, penggunaan KTP memiliki beberapa keterbatasan, seperti risiko kerusakan atau kehilangan, serta ketergantungan pada keberadaan fisik dokumen tersebut dalam setiap transaksi. Selain itu, memerlukan media cetak khusus berupa blangko yang dilengkapi elemen keamanan seperti chip, hologram, dan tinta khusus.

Sementara, IKD hadir sebagai solusi digital yang lebih modern dan efisien dengan menyimpan informasi identitas penduduk secara elektronik dan dapat diakses melalui aplikasi yang terpasang pada *smartphone*. Dengan menggunakan IKD, masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP fisik setiap saat karena data identitas sudah tersedia secara digital. IKD juga memungkinkan integrasi dengan berbagai layanan digital lainnya, seperti layanan perbankan, dan transportasi sehingga menciptakan ekosistem data kependudukan yang lebih terhubung, dinamis, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Penerapan IKD diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi digital nasional serta meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis data dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan mendasar antara IKD dan KTP menjadi penting, terutama dalam konteks perumusan kebijakan, pengembangan sistem informasi kependudukan, maupun peningkatan literasi digital masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemahaman ini menjadi landasan awal dalam menjawab tantangan modernisasi administrasi kependudukan di Indonesia.

Merujuk pada pandangan di atas, dapat dijabarkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan tahapan-tahapan tertentu, seperti penyusunan regulasi, ketersediaan sumber daya, serta penyampaian kebijakan yang memiliki konsep dan program yang jelas. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik, termasuk penyelenggaraan IKD. Kemudian, Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembentukan Identitas Kependudukan Digital (Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022). Surat Edaran ini berisi instruksi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk mempercepat pembentukan IKD. Lebih lanjut, Disdukcapil Kota Tangerang Selatan juga mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 400.12.2.1/1543/DISDUKCAPIL/2023 tentang Pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Layanan Publik. Identitas Kependudukan Digital ini merupakan bentuk digital dari data kependudukan yang termuat dalam KTP elektronik dan dapat diakses melalui aplikasi pada perangkat *smartphone*. Dalam Bab III Pasal 14 pada peraturan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan IKD adalah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong digitalisasi sistem kependudukan, meningkatkan pemanfaatan teknologi bagi masyarakat, serta

mempercepat layanan publik dan swasta secara digital. Sehingga kehadiran IKD diharapkan dapat mempercepat proses layanan yang berkaitan dengan identitas masyarakat, baik dalam sektor publik maupun swasta secara digital. Masyarakat pun dapat mengakses data identitas kependudukannya langsung melalui ponsel, tanpa harus membawa KTP fisik (Nurdiana et al., 2024). Meskipun tujuan tersebut telah ditetapkan, implementasinya di Kota Tangerang Selatan masih dikatakan belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, program ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Meski demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan melaksanakan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) khusus bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan data Disdukcapil setempat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 – 2024

Kota	Jumlah Penduduk Jiwa) Tahun 2022-2024		
	2022	2023	2024
Tangerang Selatan	1.394.015	1.414.619	1.463.607

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk (jiwa) yang ada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.394.015 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2023-2024 mulai meningkat sebanyak 11.414.619 jiwa dan pada tahun 2024 sebanyak 1.463.607 jiwa. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam tabel di atas penulis memfokuskan penelitian hanya di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Provinsi Banten tepatnya Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Aktivasi IKD, Wajib KTP, Pada Tahun 2024

Nama	Jumlah
Aktivasi IKD	45.839
Penduduk Wajib KTP	1.062.707

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, tercatat bahwa daftar jumlah yang sudah melakukan aktivasi IKD hingga pertengahan akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 45.839 jiwa, hal tersebut masih tergolong rendah karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD tersebut. Sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1.062.707 jiwa, jumlah tersebut dapat menggambarkan bahwa sudah banyak masyarakat yang memiliki wajib KTP. Selain itu, pelayanan kependudukan IKD ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), surat pindah, dan kartu identitas anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Lebih lanjut, IKD ini dapat dikatakan berhasil karena memberikan kemudahan dalam pengelolaan data kependudukan masyarakat. Sebagai contoh, apabila Kartu Keluarga (KK) hilang, masyarakat tidak lagi

diwajibkan untuk melampirkan surat kehilangan dari kepolisian, mengisi formulir, maupun mengajukan permohonan melalui laman resmi. Perubahan data seperti golongan darah atau tingkat pendidikan dapat dilakukan langsung melalui aplikasi IKD tanpa persyaratan tambahan, pengguna cukup melakukan input data, dan dokumen hasil pembaruan akan dikirimkan melalui email. Selain itu, proses mutasi penduduk antarwilayah, baik keluar maupun masuk suatu kota, tidak lagi memerlukan pendaftaran melalui sistem daring. Keamanan IKD pun terjamin karena menggunakan verifikasi biometrik berupa sidik jari dan kode PIN sehingga meminimalkan potensi pemalsuan. Hal ini berbeda dengan KTP-el yang masih dapat hilang secara fisik dan berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada bulan Oktober tahun 2024 melalui media massa yaitu tercatat bahwa pada awal tahun 2024 jumlah warga yang telah mengaktivasi IKD hanya sebanyak 27.000, namun sampai saat ini sudah sebanyak 45.000 ribu warga dari total 1.062.707 penduduk Kota Tangerang Selatan yang telah masuk kategori wajib e-KTP kini telah melakukan aktivasi IKD di Kota Tangerang Selatan. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Bapak Dedi Budiawan pada Kamis, 17 Oktober 2024 yang mengatakan:

“Yang sudah aktivasi IKD baru sekitar 4,58% warga Kota Tangerang Selatan yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Bapak Dedi Budiawan mengakui bahwa jumlah tersebut masih rendah, hal itu didasari dari masyarakat yang merasa belum membuntuhkan, banyak perusahaan atau instansi yang belum menerima menggunakan IKD, tidak memiliki kuota internet. Namun, paling banyak masalah yang ditemukan di lapangan adalah versi handphone masih versi yang lama, karena hal itu, tidak semua orang HP-nya *smartphone*”.

Sehingga, misalnya warga ingin membuat buku rekening di bank sampai saat ini warga masih menyerahkan e-KTP dan beberapa bank belum bisa melakukan barcode melalui IKD karena beberapa pihak bank belum menyediakan fasilitas tersebut, apabila fasilitas barcode tersedia dan masyarakat sudah memiliki IKD maka semuanya akan jauh lebih mudah dan cepat karenanya ia mengharapkan agar instansi-instansi pelayanan publik bisa menyediakan fasilitas yang mendukung agar IKD bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Dijelaskan juga IKD mulai berjalan di Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2023 hingga sampai saat ini setiap hari kerja selalu ada yang melakukan aktivasi setiap harinya. Proses aktivasi IKD juga sangat mudah, langkah awal dengan mendownload aplikasi Identitas Kependudukan Digital terlebih dahulu melalui playstore/appstore di *smartphone* masing-masing. Setelah itu, memasukkan identitas berupa NIK, email dan nomor handphone hingga akan ada arahan lanjutan untuk melakukan verifikasi berupa selfie, setelah selfie maka bisa melakukan aktivasi di Disdukcapil, Kecamatan, atau Kelurahan, dan waktu aktivasi pun tidak lebih dari lebih dari 3 menit. Untuk mendukung penggunaan IKD dalam layanan publik, diperlukan perangkat seperti scanner agar petugas dapat dengan mudah mengakses data identitas masyarakat. Namun saat ini, minat masyarakat masih terbatas karena banyak yang belum menganggap IKD sebagai kebutuhan yang mendesak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan di Kota Surabaya seperti Kecamatan Tambaksari, dikutip dalam Bella, V. S. & Widodo, J (2023) implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan

kewajiban bagi setiap masyarakat yang datang untuk melakukan pengajuan permohonan cetak ulang KTP-el karena hilang atau rusak. Ada pula kendala yang dihadapi dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terjadi di Kecamatan Tambaksari yaitu masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak memiliki *smartphone*, disisi lain meskipun memiliki *smartphone* masyarakat juga masih banyak yang tidak mahir dalam mengoperasikan aplikasinya sehingga banyak yang hanya melakukan aktivasi setelah itu tidak mengetahui cara menggunakan ataupun kegunaan dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) itu sendiri. Selain itu Identitas Kependudukan Digital (IKD) beberapa kali mengalami server error, sehingga masyarakat yang ingin melakukan aktivasi harus menunggu jaringan kembali normal. Kendala tersebutlah yang mengakibatkan masyarakat merasa rumit untuk melakukan aktivasi dan memilih untuk menggunakan KTP-el dalam bentuk fisik.

Selanjutnya menurut Nurdiana, I. & Ayumi, K (2024), kendala lain yang muncul pada Implementasi Identitas Kependudukan (IKD) terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Tanjungpinang yaitu adanya keterbatasan masyarakat dalam memahami teknologi seperti masih banyak *smartphone* yang tidak bisa menginstal Identitas Kependudukan Digital (IKD) dikarenakan memori yang penuh atau *smartphone* yang tidak mendukung, ditambah dengan banyaknya masyarakat awam yang sering lupa dengan pin atau email masing-masing yang menghambat proses pengaktifasian. Adapun dalam tulisan yang berjudul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara” juga

menyampaikan bahwa rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menjadi hambatan besar dalam implementasinya (Rahmawati, L. et al., 2024). Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta kualitas koneksi internet yang tidak memadai juga menjadi penghambat yang signifikan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyebabkan masyarakat menjadi sulit dalam mengakses secara *online*.

Urgensi dari evaluasi keberhasilan implementasi IKD terletak pada kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah, khususnya implementasi IKD di Kota Tangerang Selatan. IKD adalah program nasional kementerian dalam negeri sebagai bagian dari *e-government*, IKD sebagai identitas digital yang tidak hanya menggantikan KTP fisik, tetapi juga menjadi kunci utama akses layanan publik dan privat secara efisien, aman, dan terintegrasi. Namun, pada kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi IKD ini masih rendah, yang dimana hanya sekitar 4,58% masyarakat Kota Tangerang Selatan yang telah memiliki KTP melakukan aktivasi IKD. Sedangkan standar harapan yang diharapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat Tangerang Selatan yang menerapkan IKD adalah sebanyak 30 persen atau sekitar 300 ribuan masyarakat. Maka dapat dilihat belum tercapainya target pelaksanaan ini menggambarkan bahwa efektivitas/evaluasi keberhasilan kegiatan masih belum tercapai maksimal dan hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang harus segera diatasi dalam evaluasi keberhasilan implementasi IKD di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini merujuk pada teori George C. Edwards III yang menguraikan bahwa evaluasi keberhasilan implementasi suatu program dapat dianalisis berdasarkan empat kriteria utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Leo Agustino, 2020). Analisis hasil dari implementasi program ini mencakup faktor-faktor tersebut untuk menilai efektivitasnya. Dari pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang pada intinya adalah menempatkan keberhasilan implementasi kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak (publik) dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat dan swasta). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai *leading sector*. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya. Untuk itu dalam implementasi aktivasi IKD ini juga dilihat evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan atau program tersebut dari perspektif teori George C. Edward III. Dipakai teori ini karena model George C. Edward III sesuai dengan karakteristik kebijakan yang merupakan kebijakan dibuat secara nasional atau yang ditetapkan secara *top down*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan melihat fenomena dan urgensi serta manfaat yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan” dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam proses penelitian mulai dari pengumpulan data hingga pengambilan kesimpulan serta sebagai lokus dari penelitian.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap program aplikasi IKD masih kurang karena masyarakat menganggap bahwa penggunaan IKD belum mendesak/dibutuhkan dan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa instansi pelayanan yang tetap menggunakan KTP fisik.
2. Minimnya tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan pelayanan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. Tidak semua masyarakat memiliki *smartphone* yang kompatibel dengan aplikasi IKD.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini akan berguna dalam memajukan pengetahuan dan pemahaman akademik teori administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Selain itu,

diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dan memberikan kontribusi secara akademisi untuk mengembangkan pemahaman teoritis mereka.

2. Analisis temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi untuk pengembangan teori Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai pemenuhan tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar strata satu. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman serta sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

2. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan berguna bagi instansi terkait dan pemerintah sebagai rekomendasi, saran, kritik, serta masukan untuk menjaga, memperbaiki maupun

meningkatkan Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya bagi para masyarakat umum yang ingin membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

4. Bagi Universitas Diponegoro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitian dengan topik yang relevan.

1.5 Kerangka Teori

Sebuah penelitian untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan diperlukan kerangka pikir yang berisikan konsep-konsep yang telah dibuat sesuai batasan arah penelitian yang menjadi landasan teoritis dalam melaksanakan penelitian untuk menemukan jawaban atas apa yang dicari.

Kerangka teori ini merupakan sebuah konsep-konsep atas teori-teori yang relevan yang digunakan di dalam penelitian untuk menjelaskan

hubungan antar variabel sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan pada rumusan masalah yang telah dibuat untuk dijawab. Teori-teori tersebut menjadi hal penting yang mendukung sehingga dalam penelitian ini menjelaskan digunakannya beberapa teori yang berkaitan.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai acuan dan eksplorasi pengetahuan serta informasi dan referensi terhadap rumusan maupun hasil dari penelitian ini. Penelitian terdahulu ini merupakan beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu ini menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan serupa, sehingga dapat ditemukan celah atau kesenjangan yang menjadi dasar fokus penelitian selanjutnya. Penelitian mengenai evaluasi keberhasilan implementasi program telah banyak dilakukan dengan pendekatan dan temuan yang beragam. Dalam tinjauan ini, berbagai artikel yang membahas pelaksanaan program sejenis digunakan sebagai landasan teoritis serta untuk memperkaya pengembangan wawasan ilmiah.

Penelitian terdahulu atau (*state of the art*) dilakukan untuk mendapatkan permasalahan dan tujuan yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti. Berdasarkan penelitian terdahulu yang

digunakan oleh penulis sebagai referensi dan acuan untuk menyusun penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
1.	Vivtania Salsa Bella dan Djoko Widodo (2023)	Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari	Mengetahui sejauhmana penerapan IKD dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari	Metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan teori implementasi George C. Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.	Di Kecamatan Tambaksari proses implementasi IKD yang mencakup empat variabel atau dimensi dalam implementasi sudah cukup baik dan proses implementasi sudah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang ada, sebagian dari masyarakat juga sudah melakukan aktivasi IKD bahkan sampai sudah menggunakan IKD untuk pelayanan publik lainnya seperti mengambil bantuan maupun proses pelayanan di Bank.
2.	Irma Nurdiana dan Khithoh	Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan	Untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek ini dengan tujuan	Metode penelitian kualitatif dengan memperoleh data	Implementasi IKD menghadapi beberapa kendala, namun upaya

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
	Ayumi (2024)	Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang	memberikan rekomendasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi teknologi identitas kependudukan digital di tingkat lokal.	primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari informasi media dan internet. Teori yang digunakan yaitu George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, serta struktur birokrasi.	komunikasi dan disposisi yang baik menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan keberhasilan program.
3.	Lisna Rahmawati, Agus Sya'bani Arlan, dan Nida Urahmah (2024)	Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara	Untuk mengetahui Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu George C. Edward III.	Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Pertama, pada subvariabel komunikasi yaitu indikator transmisi tidak berfungsi dengan baik, kejelasan kurang baik, konsistensi kurang baik. Kedua, sumber daya yaitu staf bekerja dengan baik, ruangan kurang tertata,

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
					aparap dikatakan bekerja dengan baik. Ketiga, pemeringkatan indikator sikap pelaksana dikatakan lancar, insentif kurang baik. Keempat, struktur birokrasi indikator standar operasional sistem (SOP) dapat dikatakan baik, fragmentasi cukup baik. Selain itu, kurangnya animo masyarakat dan konektivitas internet menjadi faktor penghambat Program Identitas Kependudukan Digital (DPI). Di saat yang sama, keberadaan mentor menjadi faktor pendorongnya.
4.	Frederikus Patu dan Ika Devy Pramudiana (2023)	Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan E-Ktp Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur	Memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi pelayanan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Timur, serta mengevaluasi efektivitasnya dan merumuskan	Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan menurut George C. Edwards III memanfaatkan empat variabel dalam analisis kebijakan publik,	Pelayanan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Timur sudah baik. Disdukcapil menyediakan petugas khusus, layanan jemput bola, dan alat bantu perekaman khusus.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
			rekomendasi untuk meningkatkannya	termasuk komunikasi, sumber daya, sikap	Meskipun antusiasme tinggi, masih ada kendala infrastruktur dan transportasi umum yang tidak ramah disabilitas serta minimnya pemahaman hak-hak mereka. Diperlukan perbaikan infrastruktur, sosialisasi intensif, dan peningkatan SDM di Disdukcapil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
5.	Muhammad Alfian Prasetyo dan Diana Hertati (2024)	Implementasi Klampid New Generation (KNG) Dalam Menunjang Optimalisasi Pelayanan Cetak Ulang E-Ktp Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya	Mengetahui sejauhmana implementasi Klampid New Generation (KNG) dalam menunjang optimalisasi pelayanan cetak ulang KTP di Kantor Kelurahan Ampel.	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan teori implementasi oleh George C. Edward III yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur organisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KNG dalam menunjang optimalisasi pelayanan cetak ulang KTP di Kantor Kelurahan Ampel sudah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang harus segera dibenahi agar proses implementasi dapat berjalan

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
					dengan lebih maksimal, seperti kurangnya fasilitas penunjang pelayanan, kurangnya jumlah verifikator SIAK di Kelurahan, minimnya kesadaran masyarakat dalam membawa berkas pengajuan dalam kondisi jelas atau baik, dan sulitnya melakukan akses IKD yang merupakan salah satu syarat pengajuan cetak ulang KTP.
6.	Zelfi Nanda Gustiana dan Syafrudin Pohan (2024)	Efektifitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai	Mengkaji sejauhmana efektivitas program pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang digunakan teori efektivitas dengan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program layanan IKD di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan program layanan dengan cukup baik dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan IKD, sosialisasi berjalan lancar dari Dinas Dukcapil ke

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
					Kecamatan kemudian ke Desa/Kelurahan, memudahkan penyimpanan data kependudukan dengan lebih aman, pemantauan program dapat menerima aduan dan dalam proses evaluasi server.
7.	Dwi Vira Safitri dan Drs. Ananta Prathama, M.Si (2023)	Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendorong tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tamba	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan menurut Bugged kk. 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama milenial, namun pada pelaksanaannya masih kurang optimalnya pengenalan dan terkadang layanan aplikasi tidak bisa diakses oleh masyarakat sehingga

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
					mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
8.	Ananda Dwi Firdaus dan Sri Wibawani (2023)	Innovation Of Digital Identity Application (IKD) In Improving Public Services In Gunung Anyar Urban Village	Menganalisis dan mendeskripsikan inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan teori inovasi oleh Rippetoe dan Rogers dalam Prabowo dkk. (2022: 42-43)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) diterima baik oleh warga Kelurahan Gunung Anyar. IKD hadir dengan berbagai manfaat dan keunggulan yang membuat warga merasa pelayanan publik lebih efisien sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di kelurahan Gunung Anyar.
9.	Diar Dwi Abrianto dan Heri Fathurahman (2024)	Analysis of the Policy on Implementing Digital Population Identity in the Compulsory E-KTP Community in Surakarta City	Tujuan penelitian ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kependudukan dan memberikan kepastian hukum mengenai legalitas dokumen kependudukan	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan menurut Coffman dengan tiga variabel <i>outcome</i> yakni <i>awareness</i> , <i>will</i> , dan <i>action</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mengenai penerapan Identitas

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
					Kependudukan Digital bagi warga negara yang wajib KTP-el dapat dinilai berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini juga menunjukkan efektivitas dan manfaat signifikan dari segi cakupan. Evaluasi ini dapat menjadi landasan perbaikan lebih lanjut atau menjadi acuan bagi daerah lain yang berencana menerapkan kebijakan serupa dalam pengelolaan IKD.
10.	Ika Pusparini Anindita Jayasinga dan Agus Triono (2023)	Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy	Tujuan penelitian untuk mengkaji urgensi digitalisasi administrasi kependudukan, khususnya di Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melaksanakan digitalisasi administrasi kependudukan	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan mengenai urgensi dan tantangan dalam digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki beberapa urgensi, antara lain mempercepat akses layanan dengan mengurangi waktu dan biaya yang tidak perlu, meminimalkan risiko kehilangan data, mengurangi potensi pungutan liar, dan memungkinkan dokumen

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
					berbasis digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keharusan bagi pelamar untuk melakukan verifikasi data di Kantor Administrasi Kependudukan, keterbatasan penyampaian oleh penyedia layanan, infrastruktur dan akses internet yang belum memadai di wilayah tertentu, kurangnya kepercayaan masyarakat dan kekhawatiran terhadap kebocoran data pribadi, dan kurangnya tenaga ahli yang terampil untuk mendukung percepatan digitalisasi administrasi kependudukan.
11.	Gusti Rahayu dan Jumiati (2023)	Implementation of the Dukcapil Go Digital Programs at the Payakumbuh	Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dukcapil Go

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
		City Government	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam melaksanakan program Dukcapil Go Digital	pemerintahan digital oleh Indrajit (Amanuha et al., 2021) dan teori tantangan/kendala dalam implementasi program menurut Hansen dan Mowen (Selviana Putri & Haksama, 2016)	Digital di Kota Payakumbuh bisa lebih optimal karena teori Indrajit menekankan pada optimalisasi konektivitas. Namun Dukyet Kota Payakumbuh belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi sehingga belum memanfaatkan aplikasi IKD secara maksimal

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
12.	Ofita Dwi Febrianti dan Indah Prabawati (2023)	Implementasi Kebijakan Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) di Kantor Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk	Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Terpadu Desa Online (SEDUDO) di Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Peneliti ingin memahami bagaimana SEDUDO diterapkan di desa tersebut, apa saja manfaatnya bagi masyarakat, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan menurut Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi	Implementasi SEDUDO di Desa Sekarputih masih awal dan belum optimal. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, keterbatasan akses teknologi, terbatasnya SDM yang terlatih, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Meskipun demikian, SEDUDO memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi desa, transparansi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1.5.2 Administrasi Publik

Johanes Basuki (2018:9) dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Publik: Telaah Teoretis dan Empiris* menjelaskan bahwa arti kata dari administrasi itu sendiri berasal dari kata (*ad* = intensif dan *ministrate* = melayani). Maka administrasi adalah cara intensif untuk memberikan pelayanan kepada orang lain atau masyarakat. Adapun arti publik menurut Palmer (1981) dan Mathews (1994) dalam G. Frederickson (1997) adalah publik berasal dari kata *pubes* atau kedewasaan. Makna kedewasaan disini sebagai kedewasaan fisik, emosional, dan intelektual yang menitikberatkan pada peralihan kepentingan diri pribadi untuk bergeser menjadi lebih memahami kepentingan orang lain (publik). Administrasi adalah suatu upaya secara menyeluruh terhadap segala aktivitas yang berjalan di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut (*goals and objectives*). Sedangkan publik adalah beberapa orang yang sama dalam hal berpikir, menyalurkan persaannya, harapan, sikap, dan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku (Pasolong, 2014:6). Secara umum ilmu administrasi publik didefinisikan sebagai proses kerja sama dari sekelompok manusia berdasarkan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektivitas, dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prajudi Atmosudirdjo (1982), mendefinisikan pengertian administrasi publik merupakan administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat

kenegaraan. Sementara menurut Dwight Waldo (1948), administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Amani et al., 2013).

Beddy dalam (Pasolong, 2014) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (seperti modal, sarana dan prasarana, teknologi) diorganisir (organisasi) dikelola (fungsi manajemen) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Nigro dalam (Pasolong, 2014) mengemukakan pengertian administrasi public adalah *public administration refers to cooperative efforts in a public setting* (merupakan usaha kerja sama kelompok dalam suatu susunan atau lingkungan). Menurut Nicholas Henry, administrasi publik merupakan perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik yang tujuannya adalah untuk mengiklankan suatu pengertian terhadap pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang melaksanakan perintah (Pasolong, 2014:8). Administrasi publik juga meningkatkan respon kebijakan publik dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sosial. Pemaparan inilah yang kemudian menjadikan administrasi merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai efektifitas dan efisiensi di dalamnya. Perihal inilah yang dijalankan guna menerapkan praktik manajemen kebutuhan publik yang lebih optimal lagi.

Administrasi publik menjadi dasar teori dalam pembahasan mengenai evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan

Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Menurut Chandler dan Plano, administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya dan personel publik diatur dan diselenggarakan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Prastiyono, V. I., dkk, 2021). Definisi administrasi publik ini juga dijelaskan oleh Dimock & Fox, yang menggambarkan administrasi publik sebagai produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut menganggap administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi yang mirip dengan bisnis, namun fokusnya khusus pada penghasilan barang dan jasa untuk pelayanan publik (Prastiyono, V. I., dkk, 2021).

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Robert T. Golembiewski, paradigma administrasi publik memusatkan perhatian pada fokus dan lokus. Fokus merujuk pada metode atau pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah, sementara lokus mengacu pada tempat atau konteks di mana metode tersebut diterapkan (Prastiyono, V. I., dkk, 2021).

Johanes Basuki (2018:9) dalam bukunya yang berjudul Administrasi Publik: Telaah Teoretis dan Empiris menguraikan enam paradigma administrasi publik, yakni:

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 - 1926)

Tokoh utamanya adalah Weber, Wilson, Taylor, serta Gullick dan Urwick. Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya *Politics and Administration* mengatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda yakni fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara dan fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara.

Tokoh – tokoh yang berpengaruh paradigma dikotomi administrasi dan politik pada waktu itu adalah Frank J. Goodnow, Leonard D. White. Mereka mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi. Implikasi paradigma ini adalah administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai serta diarahkan atau berfokus untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Fokus dari paradigma ini adalah struktur (desain) organisasi dan prinsip-prinsip manajemen, sedangkan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintah maupun bisnis. Sedangkan, fokusnya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas. Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya *Introduction To the study of Public Administration* oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai.

2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927 – 1937)

Diawali dengan terbitnya *Principles of Public Administration* karya W F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi Fokus kajian Administrasi Publik, sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, dimana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Paradigma kedua ini pengaruh manajemen Klasik sangat besar Tokoh-tokohnya adalah : F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu : Perlu mengembangkan ilmu Manajemen sejati untuk memperoleh kinerja terbaik ; Perlu dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawab dengan kerjanya ; Perlu ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; Perlu kerjasama yang intim (prinsip management ilmiah Taylor) antara pegawai dan atasan Kemudian disempurnakan oleh Fayol (POCCC) dan Gullick dan Urwick (Posdcorb). dengan tokoh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick dalam tulisannya *Paper on the Science of Administration* yang terkenal dengan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing,*

Coordinating, Reporting, Budgeting). POSDCORB adalah istilah yang mencakup tanggung-jawab eksekutif atas suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Perbedaan paradigma ini dengan paradigma I adalah fokus dan lokus dari administrasi publik. Pada paradigma ini fokus administrasi publik yang merupakan fungsi serta prinsip manajemen, sedangkan pemaparan lokus tidak terpapar secara rinci sehingga paradigma ini seakan menyatakan ke-universal-an fokus. Penerapan paradigma ini menjadi menekankan nilai fokus dibandingkan dengan nilai lokus.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Prinsip Management Menurut Herbert Simon (*The Poverb Administration*) ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “Public” dari “*public Administration*” menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik Kemudian muncul pendapat Morstein-Mark (*Element Of Public Administration*) yang kemudian kembali Mempertanyakan pemisahan politik san ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin.

Kesimpulannya secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan

konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan lokusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Paradigma keempat adalah masa administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Prinsip manajemen dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam seperti perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Pada masa ini terdapat dua jenis administrasi negara yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang berdasarkan pengaruh psikologi sosial dan ilmu administrasi yang menjelaskan mengenai *public policy*. Istilah *Administrative Science* digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Fokus di dalam paradigma ini mengarah pada perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya.

5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin Administrasi Negara yakni ahli Administrasi Negara meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni, dan satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijaksanaan publik.

Administrasi publik mulai merambah pada teori organisasi, ilmu kebijakan dan ekonomi politik. Fokus dari administrasi pada paradigma ini adalah teori organisasi, sedangkan lokusnya masalah kepentingan publik. Pada paradigma ini dapat diinterpretasikan bahwa *publicness* dalam administrasi publik mulai diperhatikan. Dalam paradigma ini ilmu administrasi publik (negara) mulai menemukan jati dirinya. Adanya teori bahwa administrasi negara merupakan ilmu kebijakan menjadikan ilmu administrasi publik (negara) menjadi lebih dinamis. Administrasi negara tidak lagi hanya berbicara tatanan birokrasi, tetapi lebih kepada pelayanan publik melalui kebijakan. Serta mulai melibatkan teori ekonomi untuk mewujudkan kebijakan publik (*policy science*). Perbedaan paradigma ini dengan beberapa paradigma sebelumnya terletak pada kejelasan fokus dan lokusnya.

6. Paradigma Governance (1990 – sekarang)

Paradigma keenam menjadi suatu paradigma yang terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya. *Good*

governance mulai dikenal secara luas pada tahun 1990-an sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan dan dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antar pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. *Governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (Negara/pemerintahan), *private sector* (sektor swasta/dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Hal inilah yang kemudian membedakan antara paradigma ini dengan paradigma yang lain yaitu pemaparan akan *government* yang merupakan penyelenggara pemerintahan. Dengan adanya pergantian dari *government* ke arah *governance* yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini menggunakan paradigma Governance, yang berfokus pada pentingnya kerja sama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pencapaian tujuan bersama. Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program, khususnya dalam konteks pelayanan publik, tidak hanya bergantung pada peran pemerintah semata, melainkan juga membutuhkan kontribusi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan institusi lainnya. Dengan pendekatan ini, evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dilihat sebagai hasil dari

interaksi dinamis antaraktor dalam suatu sistem tata kelola yang inklusif dan partisipatif.

1.5.4 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” yang berarti negara atau kota, dan kemudian dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang merujuk pada negara. Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi “*policie*” yang mengacu pada pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menggambarkan perilaku seorang aktor (seperti seorang pejabat, kelompok, atau badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Stephen R. Covey, kebijaksanaan berasal dari integritas, yang melibatkan integritas terhadap prinsip, didukung oleh kerendahan hati dan keberanian. (Stephen R. Covey, 2005: 442) dalam (Nur, A. C., dkk, 2019). Kebijakan publik merupakan bentuk dalam pengambilan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan urusan publik atau pemerintah yang akan dilaksanakan oleh publik dan pemerintah.

Friedrich menyatakan bahwa kebijakan adalah langkah-langkah yang diarahkan menuju tujuan yang diinginkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah di lingkungan tertentu. Hal ini melibatkan mengatasi hambatan dan mencari peluang untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Post, et al (1999) dalam (Nur, A. C., dkk, 2019), menyatakan bahwa kebijakan adalah

rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang memengaruhi kehidupan penduduk secara signifikan. Dari berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rencana tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Eyestone (1971) mengartikan kebijakan publik secara luas sebagai hubungan antara pemerintah dan lingkungannya. Menurut Anderson (1979), kebijakan adalah arah tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah atau isu tertentu. Sementara itu, Raksasataya melihat kebijakan sebagai taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, suatu kebijakan terdiri dari identifikasi tujuan, taktik atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta penyediaan masukan untuk mendukung pelaksanaan taktik atau strategi kebijakan publik.

Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwerf (1990) merupakan unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Kebijakan publik secara mendasar tiada lain untuk mencapai tujuan ideal yakni untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri. Keadilan pada konteks ini diartikan sebagai memperlakukan seolah-olah seperti sama (*treating likes alike*), sedangkan efisiensi diartikan usaha mendapatkan output terbanyak dari sejumlah input tertentu. Keamanan diartikan pemuasan minimum atas kebutuhan manusia dan kebebasan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu

yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu individu lain (Rusdiani, 2013).

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah fase yang krusial dalam siklus kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif, keputusan dari pembuat kebijakan tidak akan berhasil dijalankan. Proses implementasi dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan program kegiatan, serta ketersediaan dana untuk pelaksanaan dan penyaluran dana tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan sebagai tahapan ketiga dalam tahapan pembuatan kebijakan publik. Dimana, tahap ini adalah pelaksanaan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga diharapkan dapat berjalan dengan efektif agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru.

Menurut Grindle (1980) implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan mekanisme tentang keputusan politik ke dalam proses rutin melalui birokrasi, tetapi implementasi kebijakan juga berhubungan dengan konflik, keputusan siapa yang akan mendapatkan apa dari adanya kebijakan tersebut. Adapun menurut George Edward (2001) implementasi kebijakan merupakan proses dinamis, memiliki beberapa faktor yang saling terkait dan dapat berdampak pada implementasi kebijakan. Sementara Gordon (1986) berpendapat bahwa implementasi kebijakan berhubungan dengan rangkaian kegiatan yang diarahkan pada perwujudan suatu program.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah konsep dari suatu kegiatan yang didasarkan pada peraturan/undang-undang atau program-program yang telah dibuat berdasarkan suatu fenomena yang kompleks, prosedur yang dinamis, dan melibatkan sejumlah aktor-aktor dalam keberlangsungannya, yang mana dalam setiap kelangsungan kegiatannya memiliki tujuan dan maksud tertentu demi tercapainya dampak perubahan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, serta memiliki banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

1.5.6 Model-model Implementasi Kebijakan

Berdasarkan berbagai definisi dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa proses implementasi kebijakan akan secara tidak langsung mempengaruhi metode pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa pendekatan atau model implementasi kebijakan yang digunakan. Terdapat dua model pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni *top-down* dan *bottom-up*. Dalam buku Leo Agustino (2020) yang berjudul *dasa-dasar kebijakan publik*, dijelaskan bahwa *top-down* merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan implementasi kebijakan yang mengalami kegagalan. Namun, pendekatan ini menuai banyak kritik karena dianggap hanya mementingkan pembuat kebijakan yang bersifat sentralisasi. Berdasarkan kegagalan pendekatan tersebut, maka dibuat pendekatan *bottom-up*, pendekatan ini memasukan tujuan, jaringan kerja para aktor, aksi mereka, dan strategi. Dengan adanya pendekatan ini dapat

mendorong masyarakat untuk melakukan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah tidak terlalu berpartisipasi.

Adapun beberapa model implementasi kebijakan tersebut antara lain:

a) Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari buku Leo Agustino (2020) menyatakan bahwa model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Keenam variabel tersebut bertujuan untuk mendorong komunikasi antar organisasi dan penegak aktivitas atau pelaksana dari suatu kebijakan tersebut, mengetahui mana saja badan-badan yang bertugas mengimplementasikan beserta karakteristiknya. Tujuan yang dimaksudkan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial,

dan politik sehingga dapat diketahui model yang tepat dalam pengimplementasian agar dapat tercapai kinerja kebijakan yang dimaksudkan.

b) Model Implementasi Kebijakan Grindle

Model Merilee S. Grindle yang dikutip dari buku Leo Agustino (2020) menyatakan bahwa pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Adapun yang dimaksud dalam hal isi yaitu yang terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan. Sedangkan yang dimaksud dalam hal konteks dalam model implementasi kebijakan Grindle, yaitu adanya tiga variabel penting yang harus diperhatikan. Pertama; kekuatan dalam kepentingan aktor yang terlibat, kedua; karakter institusi dan penguasa, ketiga; tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Model implementasi kebijakan Grindle ini lebih menekankan pada konteks kebijakan, khususnya yang terkait dengan implementor (aktor yang melakukan implementasi), sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

c) Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Model George Edward III yang dikutip dari buku Leo Agustino (2020) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Menurut George Edward III terdapat 4 indikator dalam implementasi kebijakan antara lain yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2020), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Edward III dalam Leo Agustino (2020) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM), diperlukan kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- 2) Informasi dalam implementasi kebijakan memiliki dua bentuk yakni informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan saat diberi perintah untuk melaksanakan tindakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- 4) Fasilitas sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan karena sebagai fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) agar implementasi kebijakan berhasil.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III mengatakan jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan

kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo Agustino (2020) pada variabel disposisi, antara lain:

- 1) Efek Disposisi atau sikap para pelaksana dalam pemilihan dan peangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus pada kepentingan masyarakat.
- 2) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureucracy*) yang merujuk pada penunjukan dan peangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Pengaturan birokrasi ini bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- 3) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

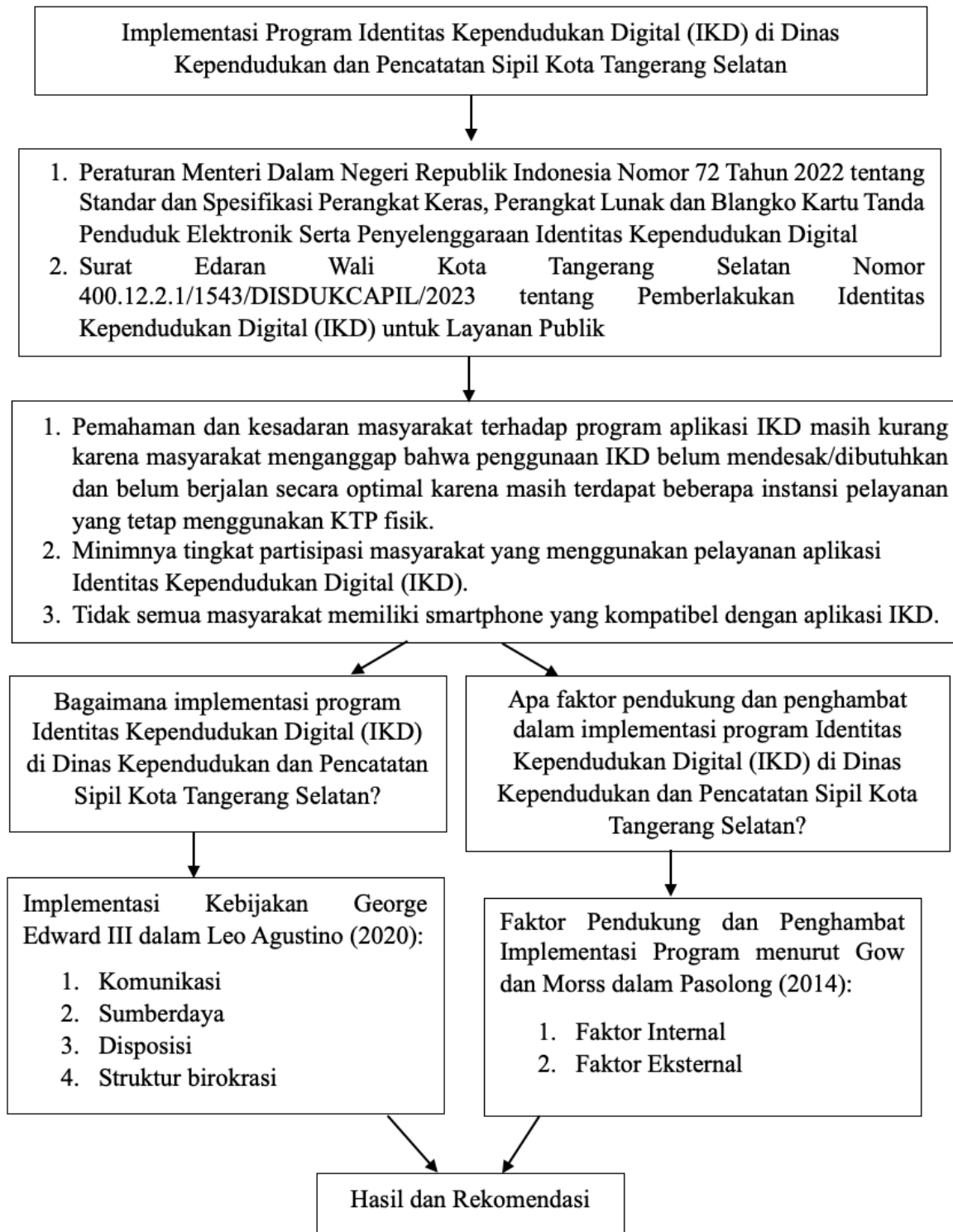
Dua karakteristik menurut Edward III dalam Leo Agustino (2020) yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- 1) Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- 2) Melaksanakan fragmentasi yang bertujuan untuk menyebar tanggung-jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Berdasarkan berbagai model-model teori implementasi kebijakan publik di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan model evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh George C. Edward III atau yang disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Menurutny, keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Alasan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III karena sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti mengenai evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang dapat membantu memahami fenomena atau permasalahan yang ada pada penelitian ini.

1.5.7 Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program. Sehingga guna memperdalam penelitian ini penulis menggunakan fenomena dan indikasi untuk menentukan alur pikir dan penyesuaian teori tentang evaluasi implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Adapun fenomena yang diteliti oleh penulis sebagai berikut.

1. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
 - a. Komunikasi

Komunikasi dalam hal IKD menginformasikan mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada masyarakat secara jelas sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi program IKD sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi di sini dapat mencakup bagaimana pemerintah menyampaikan informasi mengenai apa itu identitas digital, apa manfaatnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Fenomena yang akan diteliti dalam sub fenomena komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

b. Sumberdaya

Faktor sumberdaya dalam IKD memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan tersebut berhasil. Jika sumberdaya tidak dikelola dengan baik, maka implementasi IKD bisa terhambat. Sumberdaya yang diteliti dalam penelitian ini adalah staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi dalam hal IKD berarti bagaimana program tersebut didorong untuk diterapkan di berbagai daerah, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi dan tenaga kerja yang mendukung penerapannya. Tujuan akhirnya adalah agar seluruh masyarakat memiliki akses yang lebih cepat dan aman ke layanan kependudukan. Disposisi yang diteliti dalam penelitian ini adalah efek disposisi, dan insentif.

d. Struktur birokrasi

Dengan adanya struktur birokrasi dalam pelaksanaan IKD, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Struktur birokrasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Standar Operating Prosedures* (SOPs), dan fragmentasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi keberhasilan implementasi program merupakan faktor-faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Faktor-faktor ini dapat memberikan dorongan positif atau justru menjadi tantangan bagi efektivitas suatu kebijakan. Berikut adalah faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam evaluasi keberhasilan implementasi program IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan sebuah pengaruh yang muncul akibat dari dalam lingkungan organisasi tersebut. Kendala internal dapat terjadi karena berbagai permasalahan yang mengganggu jalannya tujuan organisasi. Faktor utama internal dalam penelitian ini akan dilihat melalui kebijakan yang di implementasikan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat seperti sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana dalam mencapai pencapaian tujuan sebagai sasaran program terkait implementasi program IKD di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan sebuah pengaruh yang muncul akibat dari luar lingkungan organisasi. Faktor utama eksternal dalam penelitian ini akan dilihat dari kondisi lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi dalam pelaksanaan evaluasi keberhasilan implementasi program IKD di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.

2.1 Argumen Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut merupakan evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik berupa program identitas kependudukan digital untuk warga negara Indonesia. Program IKD yang dibahas mengenai evaluasi keberhasilan implementasi program IKD serta faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi keberhasilan implementasi program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Setiap peneliti dalam penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan pada tiap-tiap fokus dan lokusnya. Dibutuhkan sebuah ide atau gagasan agar dapat membuat penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila dilihat dari segi kebijakan publik, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai studi evaluasi keberhasilan implementasi program pada Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Maka dari itu, peneliti akan membahas mengenai studi evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang kemudian hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi ilmu administrasi publik terutama dalam bidang evaluasi keberhasilan implementasi program, dan sebagai bahan evaluasi atau catatan perjalanan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengenai evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas

Kependudukan Digita (IKD), serta dapat memastikan apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dijalankan di lapangan maupun keberhasilannya sesuai dengan yang diharapkan.

2.2 Metode Penelitian

2.2.1 Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2005) dalam (Hasan Sazali, 2020) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan observasi terhadap permasalahan yang ada dan sasaran yang ingin dicapai. Dimana penelitian ini menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai keadaan yang seharusnya terjadi dengan realita/keadaan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari narasumber harus dipilih

dengan menggunakan metode alamiah, misalnya wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang permasalahan penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga berusaha untuk mendapatkan informasi deskriptif mengenai perilaku, tulisan, dan ucapan yang diamati dari subjek maupun objek penelitian. Sehingga penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan menganalisis dalam bentuk narasi berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan pada evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

2.2.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan penelitian berlangsung yang memberikan arah pada observasi dan analisis hasil penelitian. Pemilihan situs penelitian mempertimbangkan aspek-aspek seperti daya tarik, karakteristik khas, serta keterkaitannya dengan topik yang dikaji. Penentuan lokasi yang sesuai diharapkan dapat mendukung peneliti dalam memperoleh hasil yang signifikan dan bernilai kebaruan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang berlokasi di Jl. Raya Serpong No.1, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang bertujuan guna memperjelas subjek penelitian dan menetapkan batasan ruang lingkup

dengan menitikberatkan perhatian pada fenomena yang menjadi fokus kajian.

2.2.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai informan atau individu yang menjadi tempat penelitian yang memiliki pemahaman yang relevan dan mampu memberikan data serta informasi kepada peneliti mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2022:133) merupakan teknik penentuan sampel subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kepentingan informan, dalam hal ini memiliki kepentingan terkait dengan evaluasi keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Adapun pada penelitian kualitatif informan penelitian juga sering-sering didapatkan secara teknik *snow ball*. Apabila informasi yang telah didapat dari para informan penelitian telah “jenuh”. Maka penggalan informasi dihentikan. Hal ini artinya peneliti berhenti mencari informasi (data) karena informasi yang didapat sudah itu itu saja (para informan menjawab dengan jawaban yang sama/hampir sama). Maka, peneliti memilih informan-informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini berdasarkan kredibilitas mereka yang relevan dengan kebutuhan

penelitian yang memiliki dan mengetahui tentang program Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Adapun subjek penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
2. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Pondok Aren
4. Operator SIAK di Kecamatan Ciputat
5. Sekretaris Kecamatan Serpong Utara
6. Masyarakat Pengguna dan Tidak Pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD)

2.2.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berasal dari wawancara dengan informan yang terpilih dan berupa data-data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen, narasi atau kata-kata tertulis yang menjelaskan mengenai program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

2.2.5 Sumber Data

Pada penelitian Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sumber data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi data langsung yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber pertama oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dengan informan/subyek penelitian terkait dengan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun hambatan dalam implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber tertentu. Bertujuan untuk melengkapi dan menguatkan data pendukung utama. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti situs web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, peraturan hukum, publikasi ilmiah, dan dokumen resmi terkait dengan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta bahan

bacaan lainnya mengenai topik yang peneliti bahas pada penelitian ini.

2.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan ketiga teknik tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang saling mendukung dan melengkapi mengenai implementasi program sehingga pemilihan metode pengumpulan data melalui ketiga teknik tersebut diperlukan guna mendapatkan data penelitian mengenai topik yang diangkat secara langsung. Penjelasan mengenai ketiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti datang langsung mengamati berbagai peristiwa yang ada pada konteks penelitian. Sutrisno Hadi (1986) dalam (Mufidah, I. S. T. N. A., 2021) mengemukakan bahwa observasi merupakan serangkaian proses yang panjang dan tersusun yang memerlukan kemampuan pengamatan dan ingatan. Pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena yang sedang terjadi kemudian dilakukan pencatatan sehingga data dan informasi diperoleh sesuai apa yang diamati. Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan untuk memperoleh data dan

informasi mulai dari evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan IKD yang diterapkan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan dalam memperoleh data melalui kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan responden yang berkaitan dengan obyek dan subyek penelitian. Menurut Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2022) pengertian wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Subkoordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Subkoordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi, Subkoordinator Aktivasi IKD Kota Tangerang Selatan, dan Masyarakat pengguna serta tidak pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara terstruktur dengan adanya instrument berupa pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk diajukan kepada informan. Selain itu, digunakan *handphone* sebagai alat perekam hasil jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti saat wawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Dhoriri (2007) dalam (Mufidah, I. S. T. N. A., 2021) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan langkah untuk mendapatkan data yang berasal dari dokumen-dokumen penting, buku-buku pendukung dan foto-foto hasil penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Untuk melengkapi data dalam metode observasi dan wawancara, di dalam penelitian ini juga digunakan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari bahan tertulis untuk mengetahui evaluasi keberhasilan implementasi program IKD di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.

2.2.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif merupakan proses memilih, memilah, dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, bermakna, unik, dan temuan baru yang berkaitan dengan deskripsi, kategorisasi, dan pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2022) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, antara lain *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* seperti yang dijelaskan berikut ini:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan cara untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola sehingga data yang telah direduksi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan IKD di Kota Tangerang Selatan. Peneliti perlu memperhatikan tujuan yang akan dicapai dalam penelitiannya sehingga tujuan utama dari penelitian ini tidak keluar dari fokus penelitian.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, began, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Namun menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2022) mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Sehingga akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data ini berisi deskripsi dari hasil penelitian seperti data-data yang telah diperoleh peneliti melalui proses triangulasi dan reduksi data. Kemudian dilakukan analisis data dalam menguraikan pembahasan dengan mengkaji data untuk disesuaikan maupun dibandingkan dengan teori yang dipilih oleh peneliti. Sehingga dari hasil kajian antara data yang diperoleh dan teori yang digunakan, maka peneliti dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan berpengaruh pada IKD di Kota Tangerang Selatan.

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Menurut Miles dan Huberman (1984), langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran umum suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Selain itu, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif atau teori. Jika didukung dengan bukti yang *valid* dan konsisten maka dapat dijadikan

kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini akan menyimpulkan mengenai evaluasi keberhasilan implementasi program IKD di Kota Tangerang Selatan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan sehingga akan mempermudah dalam melakukan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

2.2.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh dengan memeriksa keabsahan data hasil penelitian. Peneliti menguji keabsahan data yang digunakan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2016:241) dalam (Damayanti, R., dkk, 2020), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Triangulasi teknik di sini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak (Sugiyono, 2016:241) dalam (Damayanti, R., dkk, 2020).

Menurut Denzin (1978) dalam (Syahrani, M., 2020) membedakan beberapa macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987) dalam (Syahrani, M., 2020). Cara yang dapat digunakan adalah : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Yang penting di sini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Patton 1987) dalam (Syahrani, M., 2020).

b. Triangulasi metode/teknik

Menurut Patton (1987) dalam (Syahrani, M., 2020) terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data (mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda) dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

- c. Triangulasi waktu yaitu menguji data dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data pada waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yang sama digunakan secara bersamaan untuk beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan perolehan data dari hasil wawancara pendapat maupun perspektif narasumber, serta dengan perolehan data hasil pengamatan peneliti melakukan observasi, maupun dari penelitian-penelitian terdahulu, dan juga dengan analisis dokumen-dokumen yang terkait.